

ABSTRAK

Nur Alim, 2024. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Masa Kampanye di Indonesia”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Masa Kampanye di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui peraturan Hukum Indonesia terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media social; Untuk Klasifikasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Pidana Islam; Untuk Mengetahui Analisis Ujaran Kebencian Dalam Masa Kampanye 2024. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian yang dimaksud mempelajari, menganalisis, membandingkan dan mengkaji sumber-sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut akan di komparatiskan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sudah menjelaskan mengenai batasan dan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang dalam bermedia sosial. Islam memberikan hukuman *ta'zir* bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. *Jarimah ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah sedangkan dalam Pidana positif penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial penjelasan hukumannya terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Salah satu menjadi marak ketika menjelang Pemilu adalah Ujaran Kebencian. Maraknya ujaran kebencian ketika pada fase kampanye. Idealnya sebagai agenda politik kebangsaan, seharusnya kampanye menjadi sarana pendidikan politik yang berkualitas, bukan sebaliknya. Kampanye harus menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi warganya. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, kampanye sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Tindak Pidana, Media Sosial, Pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Nur Alim, 2024. "Review of Criminal Law Against Perpetrators of Hate Speech During the Campaign Period in Indonesia". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by Takdir and Dirah Nurmila Siliwadi.

This thesis discusses the Review of Criminal Law Against Perpetrators of Hate Speech During the Campaign Period in Indonesia. This research aims: To find out Indonesian legal regulations regarding criminal acts of hate speech via social media; For the Classification of Hate Speech Crimes in Islamic Criminal Law; To find out the analysis of hate speech during the 2024 campaign period. This type of research uses normative legal research methods with a comparative approach supported by data obtained through library research. The research in question studies, analyzes, compares and examines other sources that are closely related to the problem being discussed. After the data is collected, the data will be compared. The research results show that the provisions regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions explain the limits and things a person can and cannot do when using social media. Islam provides ta'zir punishment for perpetrators of insults, defamation and the like. Jarimah ta'zir are crimes whose form and punishment are determined by the government, which do not conflict with the principles, values and objectives of sharia, whereas in the positive crime of insulting and/or defaming through social media the explanation of the punishment is contained in article 27 paragraph (3) ITE Law. One thing that became widespread during the lead up to the General Election was Hate Speech. The rise of hate speech during the campaign phase. Ideally, as a national political agenda, the campaign should be a means of quality political education, not the other way around. Campaigns must be a means of good political education for citizens. The aim of debating ideas in the public sphere is to generate public awareness of democracy. Therefore, the campaign should be carried out as an effort to educate the public's politics in order to form a more democratic society that respects diversity

Keywords: Hate Speech, Crime, Social Media, Accountability.